PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
DINAS SOSIAL

# RENCANA KERJA
# TAHUN 2026



*SALINAN*

BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 46 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 24 September 2025

BUPATI NATUNA,

ttd

CEN SUI LAN

Diundangkan di Ranai
pada tanggal 24 September 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NATUNA,

ttd

BOY WIJANARKO VARIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2025 NOMOR 440

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

EFENDI,S.Sos
19710426201001101 4

# KATA PENGANTAR

Segala puji kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kabupaten Natuna Tahun 2026 dapat tersusun sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kabupaten Natuna Tahun 2026 dimaksudkan sebagai dasar penyusunan kebijakan, program, kegiatan, dan indikator (tolak ukur) kinerja kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Natuna dalam mencapai tujuan organisasi. Dengan tersusunnya Rencana Kerja ini diharapkan dapat dijadikan dasar penyusunan anggaran oleh Dinas Sosial Kabupaten Natuna Tahun 2026 dan melalui dokumen ini pihak yang berkepentingan dapat memperoleh informasi secara transparan.

Kami menyadari masih terdapat kekurangan yang membutuhkan perbaikan dan penyempurnaan dalam perencanaan ini. Kami ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Natuna Tahun 2026.

Ranai, 24 September 2025
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Natuna

**PURYANTI, SP., M.A.P**
Pembina Utama Muda
NIP. 19750706 200003 2 008

# DAFTAR ISI


| | | |
|---|---|---|
| **BAB I** | **PENDAHULUAN** | **1** |
| | 1.1 Latar Belakang | 1 |
| | 1.2 Landasan Hukum | 4 |
| | 1.3 Maksud dan Tujuan | 7 |
| | 1.4 Sistematika Penulisan | 7 |
| **BAB II** | **EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS SOSIAL TAHUN LALU** | **9** |
| | 2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Sosial Tahun Lalu dan Capaian Renstra | 9 |
| | 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah | 16 |
| | 2.3 Isu- isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi | 18 |
| | 2.4 Revieu Terhadap Rancangan Awal RKPD | 21 |
| | 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat | 21 |
| **BAB III** | **TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN** | **22** |
| | 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional | 22 |
| | 3.2 Tujuan dan Sasaran | 23 |
| | 3.3 Program dan Kegiatan | 26 |
| | 3.4 Cascading dan Crosscutting | 28 |
| **BAB IV** | **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANAGKAT DAERAH** | **31** |
| | 4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Sosial Kabupaten Natuna pada tahun 2026 | 31 |
| **BAB V** | **PENUTUP** | **43** |

## DAFTAR TABEL


| | | |
|---|---|---|
| TABEL 2.1 | Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Dinas Sosial pada Tahun 2024..... | 12 |
| TABEL 2.2 | Capaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial ..... | 18 |
| TABEL 2.3 | Capaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Tahun 2024... | 19 |
| TABEL 2.4 | Usulan Program dan Kegiatan Pembangunan Tahun 2026 dari Pemangku Kepentingan..... | 21 |
| TABEL 3.1 | Tujuan Dinas Sosial Tahun 2026..... | 24 |
| TABEL 3.2 | Sasaran Dinas Sosial Tahun 2026..... | 25 |
| TABEL 3.3 | Rekapitulasi Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Tahun 2026..... | 26 |
| TABEL 4.1 | Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Dinas Sosial Kabupaten Natuna Tahun 2026..... | 35 |

## DAFTAR GAMBAR


| | | |
|---|---|---|
| GAMBAR 3.1 | Cascading Dinas Sosial Tahun 2026..... | 29 |
| GAMBAR 3.2 | Crosscutting Kinerja Program Dinas Sosial Tahun 2026..... | 30 |

# BAB I
# PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Natuna yang kemudian dijabarkan dengan Peraturan Bupati Natuna Nomor 62 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemerintah Kabupaten Natuna dan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang kemudian dijabarkan dengan Peraturan Bupati Natuna Nomor 2 Tahun 2022. Kemudian di ubah kembali berdasarkan Peraturan Bupati Natuna nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemerintah Kabupaten Natuna, tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Natuna adalah merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, dan menetapkan kebijakan daerah di bidang Sosial.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Dinas mempunyai fungsi:

a. pengelolaan kegiatan kesekretariatan, meliputi perencanaan dan evaluasi, keuangan, umum, dan kepegawaian;
b. perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial, dan Bidang Pemberdayaan dan Jaminan Sosial;
c. pelaksanaan pemberian rekomendasi perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang Sosial;
d. penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian di bidang sosial;
e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.;

Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja Dinas Sosial merupakan penjabaran Renstra Dinas Sosial yang mengacu pada Rancangan Awal RKPD Kabupaten Natuna. Renja Dinas Sosial memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dikerjakan oleh Dinas Sosial dalam satu tahun anggaran sekaligus menjawab pertanyaan apa yang menjadi tujuan, sasaran peningkatan pelayanan, target capaian kinerja, serta bagaimana pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan Perangkat Daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya. Selain itu Renja Dinas Sosial Mengakomodasikan hasil Musrenbang RKPD dan Forum Perangkat Daerah.

Proses penyusunan Renja Dinas Sosial Kabupaten Natuna diawali dengan persiapan penyusunan renja, dilanjutkan dengan Penyusunan Rancangan Renja, Forum SKPD, dan Penetapan Renja melalui Peraturan Bupati Kabupaten Natuna.

**1. Persiapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah**

Persiapan Penyusunan Renja Dinas Sosial mencakup :

1) Penyusunan Rancangan Keputusan Kepala Dinas Sosial tentang pembentukan tim Penyusun Renja;
2) Orientasi mengenai Renja;
3) Penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja; dan
4) Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.

**2. Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah**

Aktivitas dalam penyusunan Rancangan Renja Dinas Sosial meliputi:

1) Perumusan Rancangan Renja, dan
2) Penyajian Rancangan Renja.

Perumusan rancangan Renja Dinas Sosial mencakup :

a) Pengolahan data dan informasi;
b) Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun Lalu berdasarkan Renstra;

c) Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi;
d) Telaahan terhadap rancangan awal Renja;
e) Perumusan tujuan dan sasaran;
f) Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;
g) Perumusan kegiatan prioritas;
h) Penyajian awal dokumen rancangan Renja;
i) Penyempurnaan rancangan Renja;
j) Pembahasan Forum Perangkat Daerah; dan
k) Penyesuaian dokumen rancangan Renja sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun rencana dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan umum pembangunan daerah.

**3. Forum Perangkat Daerah**

Forum Perangkat Daerah bertujuan untuk penyelarasan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Natuna berdasarkan usulan program dan kegiatan hasil musrenbang kecamatan. Dalam Forum Perangkat Daerah ini rancangan Renja Dinas Sosial dibahas, sehingga diperoleh masukan perbaikan program dan kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah.

**4. Penetapan Renja SKPD**

Pada tahap ini, rancangan Renja Dinas Sosial yang telah disempurnakan dan sesuai dengan RKPD kepada Bupati untuk memperoleh pengesahan dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Renja Dinas Sosial memiliki keterkaitan dengan dokumen RKPD Kabupaten Natuna, Renstra Dinas Sosial, dengan Renja Kementerian/Lembaga. Penyusunan Renja mengacu pada Rancangan Awal RKPD, dan memperhatikan dokumen Renstra Dinas Sosial tahun 2021-2026 serta Renstra Kementerian/Lembaga tahun 2020 - 2024. Renja Dinas Sosial selanjutnya menjadi bahan dalam penyusunan RKA dan DPA.

## 1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6323);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2020 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 72);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Eevaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 Nomor 43);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 16);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 18 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten Natuna Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 18);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Natuna Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2024 Nomor 49);
19. Peraturan Bupati Natuna Nomor 81 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 83) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Natuna Nomor 34 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 81 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah

Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2023 Nomor 274);

20. Peraturan Bupati Natuna Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemerintah Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2024 Nomor 318).

## 1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Dinas Sosial Kabupaten Natuna tahun 2026 sebagai berikut:

**1. Maksud**

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja adalah penjabaran tujuan, sasaran dan program kegiatan Dinas Sosial ke dalam rencana tahunan guna memberikan arah dalam menunjang pelaksanaan pembangunan daerah.

**2. Tujuan**

Rencana Kerja ini disusun dengan tujuan sebagai berikut:

a. Menjabarkan tujuan, sasaran strategi dan kebijakan Dinas Sosial ke dalam program dan kegiatan tahunan sesuai dengan isu dan permasalahan mendesak dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial;
b. Menetapkan tolak ukur dan target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai dasar dalam melakukan evaluasi kinerja tahun 2026;

## 1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Dinas Sosial Kabupaten Natuna tahun 2026 sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu, berisi tentang Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah, Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat

Daerah, Isu- isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi perangkat daerah; Review terhadap Rancangan Awal RKPD dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bab III Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan sub Kegiatan Tahun 2026, berisi tentang Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah, berisi tentang Program, Kegiatan dan Sub kegiatan Tahun 2026

Bab V Penutup, berisi tentang kaidah pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Sosial Tahun 2026.

# BAB II
# HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

## 2.1. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Sosial Kabupaten Natuna Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2024 menunjukkan bahwa secara umum pelaksanaan program dan kegiatan di Dinas Sosial Kabupaten Natuna berjalan dengan baik. Dinas Sosial Kabupaten Natuna mengelola anggaran belanja langsung sebesar Rp.8.779.132.190,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.7.089.175.066,00 atau sebesar 80,75%.

Berikut ini diuraikan mengenai hasil evaluasi pelaksanaan renja tahun 2024 dan capaian Renstra Dinas Sosial Kabupaten Natuna.

1. Daftar program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan meliputi :

**a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**

1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

3) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

4) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
- Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material
- Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

- Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

4) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Sub Kegiatan Pengadaan Mebel
- Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Sub Kegiatan Pengadaan Aset Tetap Lainnya

5) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Sub Kegiatan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

5) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

**b. Program Pemberdayaan Sosial**

1) Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota

- Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
- Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)

**c. Program Rehabilitasi Sosial**

1) Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial

- Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan
- Sub Kegiatan Penyediaan Sandang
- Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu
- Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial

- Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat
- Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
- Sub Kegiatan Pemberian Layanan Rujukan

**d. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial**

1) Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

- Sub KegiatanFasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
- Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat

**e. Program Penanganan Bencana**

1) Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota

- Sub Kegiatan Penyediaan Makanan

2) Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten//Kota

- Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana

**f. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan**

1) Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota

- Sub Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota

2. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Dinas Sosial. Capaian Renstra secara umum telah berjalan dengan baik, dengan capaian pada seluruh kegiatan telah mencapai 86,56 persen, bahkan sebagian diantaranya telah melebihi target kinerja maupun anggaran yang direncanakan dalam Renstra.
3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil pada penyusunan Renja tahun 2026 yaitu perlu dilakukan sinkronisasi kegiatan untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mendukung capaian target kinerja.

Secara rinci Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Dinas Sosial s/d Tahun 2024 terlihat pada Tabel 2.1

# Tabel 2.1
# Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Dinas Sosial pada Tahun 2024

| Kode | Sasaran | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output) | Satuan | Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD) | | Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2023 | | Target Kinerja Angaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi | | | | Realisasi Kinerja pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2024 yang dievaluasi (%) | | Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024 | | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | | |
| | | | | | 5 | | 6 | | 7 | | | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12=8+9+10+11 | | 13=12/7 x100 | | 14=6+12 | | 15=14/5x100 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4A | k | Rp | k | Rp | k | Rp Renja | k | Rp DPA | k | Rp | k | Rp | k | Rp | k | Rp | k | Rp | k | Rp | k | Rp | k | Rp | 16 |
| **1.** | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.06.** | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.06.01.** | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA** | **Nilai Laporan LKjIP** | **Nilai** | **78.00** | **58,210,000** | **73.15** | **41,766,504** | **79.00** | **58,210,000** | **79.00** | **26,466,200** | **78.05** | **5,374,866** | **78.05** | **462,352** | **78.05** | **924,704** | **78.05** | **1,432,727** | **78** | **8,194,649** | **98.80** | **30.96** | **78.05** | **41,766,504** | **98.80** | **71.75** | |
| **1.06.01.2.01.** | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah** | **Persen** | **100** | **58,210,000** | **100** | **41,766,504** | **100** | **58,210,000** | **100** | **26,466,200** | **100** | **5,374,866** | **100** | **462,352** | **100** | **924,704** | **100** | **1,432,727** | **100** | **8,194,649** | **100.00** | **30.96** | **100** | **41,766,504** | **100.00** | **71.75** | |
| 1.06.01.2.01.06. | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Laporan | 2 | 58,210,000 | 4 | 41,766,504 | 2 | 58,210,000 | 2 | 26,466,200 | 2 | 5,374,866 | 2 | 462,352 | 2 | 924,704 | 2 | 1,432,727 | 2 | 8,194,649 | 100.00 | 30.96 | 6 | 41,766,504 | 300.00 | 71.75 | |
| **1.06.01.** | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA** | **Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP** | **Persen** | **85** | **4,366,251,400** | **100** | **10,950,920,152** | **85** | **4,170,603,971** | **85** | **4,658,162,330** | **85** | **1,078,436,092** | **85** | **1,190,036,345** | **85** | **1,003,669,195** | **85** | **809,921,080** | **85** | **4,082,062,672** | **100.00** | **87.63** | **85** | **10,950,920,152** | **100.00** | **250.81** | |
| **1.06.01.2.02.** | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Tepat Waktu** | **1** | **3,039,820,000** | **2** | **8,777,857,632** | **1** | **3,039,820,000** | **1** | **3,478,365,080** | **1** | **926,681,221** | **1** | **978,752,850** | **1** | **748,352,529** | **1** | **612,176,532** | **1** | **3,265,963,132** | **100.00** | **93.89** | **1** | **8,777,857,632** | **100.00** | **288.76** | |
| 1.06.01.2.02.01. | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Orang/bulan | 19 | 3,039,820,000 | 40 | 8,777,857,632 | 19 | 3,039,820,000 | 19 | 3,478,365,080 | 22 | 926,681,221 | 22 | 978,752,850 | 22 | 748,352,529 | 22 | 612,176,532 | 22 | 3,265,963,132 | 115.79 | 93.89 | 22 | 8,777,857,632 | 115.79 | 288.76 | |
| **1.06.01.2.05.** | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **Persentase aparatur yang bersertifikasi** | **Persen** | **11** | **30,000,000** | **9.5** | **59,220,072** | **11** | **45,000,000** | **11** | **77,250,000** | **0** | **800,000** | **13.63** | **45,776,321** | **22.72** | **1,200,000** | **22.72** | **1,443,751** | **23** | **49,220,072** | **206.55** | **63.72** | **22.72** | **59,220,072** | **206.55** | **197.40** | |
| 1.06.01.2.05.11. | | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Orang | 2 | 30,000,000 | 2 | 59,220,072 | 2 | 45,000,000 | 2 | 77,250,000 | 0 | 800,000 | 3 | 45,776,321 | 2 | 1,200,000 | 0 | 1,443,751 | 5 | 49,220,072 | 250.00 | 63.72 | 5 | 59,220,072 | 250.00 | 197.40 | |
| **1.06.01.2.06.** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran** | **Persen** | **75** | **477,231,400** | **100** | **944,113,011** | **75** | **465,883,971** | **75** | **503,393,460** | **75** | **45,528,271** | **75** | **55,093,324** | **75** | **115,714,978** | **75** | **77,709,656** | **75** | **294,046,229** | **100.00** | **58.41** | **75** | **944,113,011** | **100.00** | **197.83** | |
| 1.06.01.2.06.02. | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Paket | 1 | 48,000,000 | 9 | 324,824,481 | 1 | 48,000,000 | 1 | 75,996,110 | 4 | 11,038,400 | 4 | 10,016,500 | 4 | 20,586,500 | 4 | 8,310,250 | 4 | 49,951,650 | 400.00 | 65.73 | 13 | 324,824,481 | 1,300.00 | 676.72 | |
| 1.06.01.2.06.03. | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | Paket | 1 | 25,000,000 | | 0 | 1 | 25,000,000 | 1 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 1.06.01.2.06.04. | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Paket | 1 | 12,000,000 | 2 | 21,517,000 | 1 | 12,000,000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2 | 21,517,000 | 200.00 | 179.31 | |
| 1.06.01.2.06.05. | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | Paket | 3 | 32,966,400 | 6 | 60,610,950 | 3 | 32,966,400 | 3 | 27,183,000 | 3 | 5,720,250 | 3 | 3,901,150 | 3 | 7,636,350 | 0 | 0 | 3 | 17,257,750 | 100.00 | 63.49 | 9 | 60,610,950 | 300.00 | 183.86 | |
| 1.06.01.2.06.06. | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | Dokumen | 1 | 12,000,000 | 2 | 32,350,000 | 1 | 12,000,000 | 1 | 10,400,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10,400,000 | 0 | 0 | 1 | 10,400,000 | 100.00 | 100.00 | 3 | 32,350,000 | 300.00 | 269.58 | |
| 1.06.01.2.06.07. | | Penyediaan Bahan/Material | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | Paket | 1 | 10,000,000 | | 0 | 1 | 10,000,000 | 1 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 1.06.01.2.06.09. | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Laporan | 28 | 307,265,000 | 135 | 498,500,580 | 28 | 295,917,571 | 28 | 384,848,450 | 15 | 28,769,621 | 16 | 39,675,674 | 15 | 77,092,128 | 28 | 69,399,406 | 74 | 214,936,829 | 264.29 | 55.85 | 209 | 498,500,580 | 746.43 | 162.24 | |
| 1.06.01.2.06.10. | | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Dokumen | 6 | 30,000,000 | 6 | 6,310,000 | 6 | 30,000,000 | 6 | 4,965,900 | 6 | 0 | 6 | 1,500,000 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 1,500,000 | 100.00 | 30.21 | 12 | 6,310,000 | 200.00 | 21.03 | |
| **1.06.01.2.07.** | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah** | **Persen** | **55** | **450,000,000** | **109.84** | **189,060,236** | **55** | **250,700,000** | **55** | **77,200,000** | **60.18** | **863,334** | **60.18** | **30,063,334** | **60.18** | **14,926,668** | **63.03** | **1,075,000** | **63** | **46,928,336** | **114.60** | **60.79** | **63.03** | **189,060,236** | **114.60** | **42.01** | |
| 1.06.01.2.07.02. | | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | Unit | 1 | 75,000,000 | | 0 | 1 | 35,000,000 | 1 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 1.06.01.2.07.05. | | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | Unit | 10 | 175,000,000 | 7 | 42,924,286 | 10 | 63,600,000 | 10 | 23,063,000 | 0 | 863,334 | 1 | 863,334 | 1 | 14,926,668 | 1 | 1,075,000 | 1 | 17,728,336 | 10.00 | 76.87 | 8 | 42,924,286 | 80.00 | 24.53 | |
| 1.06.01.2.07.06. | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | Unit | 10 | 150,000,000 | 18 | 134,515,950 | 10 | 142,500,000 | 10 | 51,137,000 | 0 | 0 | 6 | 26,200,000 | 0 | 0 | 8 | 0 | 6 | 26,200,000 | 60.00 | 51.23 | 24 | 134,515,950 | 240.00 | 89.68 | |
| 1.06.01.2.07.07. | | Pengadaan Aset Tetap Lainnya | Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan | Unit | 5 | 50,000,000 | 10 | 11,620,000 | 5 | 9,600,000 | 5 | 3,000,000 | 0 | 0 | 1 | 3,000,000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3,000,000 | 20.00 | 100.00 | 11 | 11,620,000 | 220.00 | 23.24 | |
| **1.06.01.2.08.** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Persentase penyediaan jasa sarana penunjang urusan perkantoran** | **Persen** | **66** | **240,000,000** | **100** | **727,375,123** | **66** | **238,000,000** | **66** | **289,205,290** | **70** | **59,533,548** | **70** | **68,813,048** | **70** | **67,369,292** | **70** | **62,839,229** | **70** | **258,555,117** | **106.06** | **89.40** | **70** | **727,375,123** | **106.06** | **303.07** | |
| 1.06.01.2.08.01. | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Laporan | 1 | 8,000,000 | 2 | 80,747,131 | 1 | 6,000,000 | 1 | 35,650,000 | 1 | 5,995,244 | 1 | 6,495,244 | 1 | 10,182,488 | 1 | 5,727,425 | 1 | 28,400,401 | 100.00 | 79.66 | 3 | 80,747,131 | 300.00 | 1,009.34 | |
| 1.06.01.2.08.02. | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Laporan | 1 | 1,000,000 | 1 | 446,500 | 1 | 1,000,000 | 1 | 5,130,000 | 1 | 26,500 | 1 | 206,000 | 1 | 75,000 | 1 | 0 | 1 | 307,500 | 100.00 | 5.99 | 2 | 446,500 | 200.00 | 44.65 | |

| Kode | Sasaran | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output) | Satuan | Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD) | | Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2023 | | Target Kinerja Angaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi | | | | Realisasi Kinerja pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2024 yang dievaluasi (%) | | Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024 | | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | | |
| | | | | | 5 | | 6 | | 7 | | | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12=8+9+10+11 | | 13=12/ x100 | | 14=6+12 | | 15=14/x100 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4A | k | Rp | k | Rp | k | Rp Renja | k | Rp DPA | k | Rp | k | Rp | k | Rp | k | Rp | k | Rp | k | Rp | k | Rp | k | Rp | 16 |
| 1.06.01.2.08.04. | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Laporan | 12 | 231,000,000 | 24 | 646,181,492 | 12 | 231,000,000 | 12 | 248,425,290 | 3 | 53,511,804 | 3 | 62,111,804 | 3 | 57,111,804 | 3 | 57,111,804 | 12 | 229,847,216 | 100.00 | 92.52 | 36 | 646,181,492 | 300.00 | 279.73 | |
| **1.06.01.2.09.** | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran** | **Persen** | **75** | **129,200,000** | **150** | **253,294,078** | **75** | **131,200,000** | **75** | **232,748,500** | **75** | **45,029,718** | **75** | **11,537,468** | **75** | **56,105,688** | **75** | **54,676,912** | **75** | **167,349,786** | **100.00** | **71.90** | **75** | **253,294,078** | **100.00** | **196.05** | |
| 1.06.01.2.09.02. | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | Unit | 2 | 23,200,000 | 5 | 180,366,592 | 2 | 25,200,000 | 2 | 172,972,500 | 3 | 42,329,718 | 3 | 10,037,468 | 3 | 5,178,202 | 3 | 50,826,912 | 3 | 108,372,300 | 150.00 | 62.65 | 8 | 180,366,592 | 400.00 | 777.44 | |
| 1.06.01.2.09.06. | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | Unit | 5 | 6,000,000 | 8 | 23,750,000 | 5 | 6,000,000 | 5 | 10,000,000 | 2 | 2,700,000 | 3 | 1,500,000 | 5 | 1,750,000 | 0 | 3,850,000 | 10 | 9,800,000 | 200.00 | 98.00 | 18 | 23,750,000 | 360.00 | 395.83 | |
| 1.06.01.2.09.09. | | Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Unit | 1 | 50,000,000 | | 0 | 1 | 50,000,000 | 1 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 1.06.01.2.09.11. | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Unit | 5 | 50,000,000 | 1 | 49,177,486 | 5 | 50,000,000 | 5 | 49,776,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 49,177,486 | 0 | 0 | 4 | 49,177,486 | 80.00 | 98.80 | 5 | 49,177,486 | 100.00 | 98.35 | |
| **1.06.02.** | | **PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL** | **Persentase Pemberdayaan Sosial** | **Persen** | **50** | **146,200,000** | **90** | **6,460,785** | **50** | **150,000,000** | **50** | **29,825,300** | **50** | **430,424** | **50** | **430,424** | **50** | **860,848** | **50** | **884,589** | **50** | **2,606,285** | **100.00** | **8.74** | **50** | **6,460,785** | **50.00** | **4.42** | |
| **1.06.02.2.03.** | | **Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota** | **Jumlah PSKS yang dikembangkan** | **PSKS** | **6** | **146,200,000** | **11** | **6,460,785** | **6** | **150,000,000** | **6** | **29,825,300** | **6** | **430,424** | **6** | **430,424** | **6** | **860,848** | **6** | **884,589** | **6** | **2,606,285** | **100.00** | **8.74** | **6** | **6,460,785** | **6.00** | **4.42** | |
| 1.06.02.2.03.02. | | Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota | Orang | 16 | 96,200,000 | | 0 | 16 | 100,000,000 | 16 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 1.06.02.2.03.05. | | Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) | Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota | Sertifikat | 1 | 50,000,000 | 0 | 6,460,785 | 1 | 50,000,000 | 1 | 29,825,300 | 0 | 430,424 | 1 | 430,424 | 1 | 860,848 | 1 | 884,589 | 1 | 2,606,285 | 100.00 | 8.74 | 1 | 6,460,785 | 100.00 | 12.92 | |
| **1.06.04.** | | **PROGRAM REHABILITASI SOSIAL** | **Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan GEPENG diluar Panti Sosial** | **Persen** | **100** | **521,967,900** | **200** | **1,822,592,856** | **100** | **500,000,000** | **100** | **1,232,522,620** | **100** | **523,807,207** | **100** | **109,126,799** | **100** | **167,788,765** | **100** | **108,673,814** | **100** | **909,396,585** | **100.00** | **73.78** | **100** | **1,822,592,856** | **100.00** | **349.18** | |
| **1.06.04.2.01.** | | **Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial** | **Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan GEPENG diluar Panti Sosial yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya** | **Persen** | **100** | **521,967,900** | **200** | **1,822,592,856** | **100** | **500,000,000** | **100** | **1,232,522,620** | **100** | **523,807,207** | **100** | **109,126,799** | **100** | **167,788,765** | **100** | **108,673,814** | **100** | **909,396,585** | **100.00** | **73.78** | **100** | **1,822,592,856** | **100.00** | **349.18** | |
| 1.06.04.2.01.01. | | Penyediaan Permakanan | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota | Orang | 10 | 50,000,000 | 0 | 0 | 10 | 70,000,000 | 10 | 6,480,000 | 111 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264 | 0 | 2,640.00 | 0.00 | 264 | 0 | 2,640.00 | 0.00 | |
| 1.06.04.2.01.02. | | Penyediaan Sandang | Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota | Orang | 10 | 30,000,000 | 0 | 0 | 10 | 30,000,000 | 10 | 10,000,000 | 111 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264 | 0 | 2,640.00 | 0.00 | 264 | 0 | 2,640.00 | 0.00 | |
| 1.06.04.2.01.03. | | Penyediaan Alat Bantu | Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota | Orang | 30 | 100,000,000 | 97 | 1,054,056,309 | 30 | 150,000,000 | 30 | 827,661,096 | 240 | 513,683,000 | 0 | 52,342,300 | 3 | 56,194,007 | 0 | 68,549,000 | 243 | 690,768,307 | 810.00 | 83.46 | 340 | 1,054,056,309 | 1,133.33 | 1,054.06 | |
| 1.06.04.2.01.05. | | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota | Orang | 50 | 50,000,000 | 0 | 0 | 50 | 50,000,000 | 50 | 18,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 1.06.04.2.01.06. | | Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat | Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | Orang | 90 | 81,000,000 | 137 | 388,780,400 | 90 | 50,000,000 | 90 | 14,240,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 137 | 388,780,400 | 152.22 | 479.98 | |
| 1.06.04.2.01.11. | | Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | Orang | 5 | 85,000,000 | 1 | 40,715,128 | 5 | 50,000,000 | 5 | 72,700,360 | 4 | 10,124,207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10,191,907 | 5 | 20,316,114 | 100.00 | 27.94 | 6 | 40,715,128 | 120.00 | 47.90 | |
| 1.06.04.2.01.12. | | Pemberian Layanan Rujukan | Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota | Orang | 5 | 125,967,900 | 5 | 339,041,019 | 5 | 100,000,000 | 5 | 282,941,164 | 0 | 0 | 4 | 56,784,499 | 2 | 111,594,758 | 0 | 29,932,907 | 6 | 198,312,164 | 120.00 | 70.09 | 11 | 339,041,019 | 220.00 | 269.15 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.06.04.** | | **PROGRAM REHABILITASI SOSIAL** | **Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)** | **Persen** | **100** | **50,000,000** | | **0** | **100** | **0** | **100** | **0** | | **0** | | **0** | | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0.00** | **0.00** | **0** | **0** | **0.00** | **0.00** | |
| **1.06.04.2.02.** | | **Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial** | **Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang direhabilitasi** | **Persen** | **100** | **50,000,000** | | **0** | **100** | **0** | **100** | **0** | | **0** | | **0** | | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0.00** | **0.00** | **0** | **0** | **0.00** | **0.00** | |
| 1.06.04.2.02.01. | | Pemberian Layanan Data dan Pengaduan | Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota | Orang | 20 | 50,000,000 | | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| **1.06.05.** | | **PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL** | **Persentase Perlindungan dan Jaminan Sosial bagi PPKS** | **Persen** | **60.09** | **135,000,000** | **177.05** | **5,811,077,610** | **60.09** | **1,024,000,000** | **60.09** | **2,339,665,700** | **95.28** | **455,794,050** | **93.28** | **507,096,121** | **94.31** | **488,699,312** | **92.9** | **79,316,549** | **93** | **1,530,906,032** | **154.60** | **65.43** | **92.9** | **5,811,077,610** | **154.60** | **4,304.50** | |
| **1.06.05.2.02.** | | **Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota** | **Persentase Desa/Kelurahan yang Aktif Mengupdate Data Terpadu Penanggulangan Kemiskinan** | **Persen** | **64.93** | **135,000,000** | **154.55** | **5,811,077,610** | **64.93** | **1,024,000,000** | **64.93** | **2,339,665,700** | **100** | **455,794,050** | **100** | **507,096,121** | **100** | **488,699,312** | **100** | **79,316,549** | **100** | **1,530,906,032** | **154.01** | **65.43** | **100** | **5,811,077,610** | **154.01** | **4,304.50** | |
| 1.06.05.2.02.03. | | Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga | Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | Keluarga | 2675 | 85,000,000 | 13831 | 3,753,719,155 | 2675 | 174,000,000 | 2675 | 2,321,676,845 | 4645 | 445,244,795 | 4636 | 506,167,321 | 4632 | 482,849,312 | 4295 | 79,316,549 | 4,295 | 1,513,577,977 | 160.56 | 65.19 | 18126 | 3,753,719,155 | 677.61 | 4,416.14 | |
| 1.06.05.2.02.04. | | Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat | Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | Orang | 50 | 50,000,000 | 20 | 2,057,358,455 | 50 | 850,000,000 | 50 | 17,988,855 | 0 | 10,549,255 | 0 | 928,800 | 0 | 5,850,000 | 0 | 0 | 0 | 17,328,055 | 0.00 | 96.33 | 20 | 2,057,358,455 | 40.00 | 4,114.72 | pemenuhan regulasi hibah bansos blm sesuai dg perbup 61 dan 71 th 2021 |
| **1.06.06.** | | **PROGRAM PENANGANAN BENCANA** | **Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya** | **Persen** | **100** | **250,000,000** | **200** | **424,794,870** | **100** | **290,000,000** | **100** | **397,229,040** | **100** | **25,815,373** | **100** | **46,994,311** | **100** | **37,463,189** | **100** | **58,923,833** | **100** | **169,196,706** | **100.00** | **42.99** | **100** | **424,794,870** | **100.00** | **169.92** | |
| **1.06.06.2.01.** | | **Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota** | **Persentase Perlindungan Sosial Bagi Korban Bencana Alam dan Sosial** | **Persen** | **100** | **200,000,000** | **200** | **228,028,465** | **100** | **190,000,000** | **100** | **300,000,000** | **100** | **16,944,500** | **100** | **45,327,645** | **100** | **25,439,300** | **100** | **20,808,507** | **100** | **108,519,952** | **100.00** | **36.17** | **100** | **228,028,465** | **100.00** | **114.01** | |
| 1.06.06.2.01.01. | | Penyediaan Makanan | Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota | Orang | 0 | 50,000,000 | 5134 | 228,028,465 | 0 | 50,000,000 | 0 | 300,000,000 | 22 | 16,944,500 | 13 | 45,327,645 | 3 | 25,439,300 | 13 | 20,808,507 | 51 | 108,519,952 | 0.00 | 36.17 | 5185 | 228,028,465 | 0.00 | 456.06 | |
| 1.06.06.2.01.02. | | Penyediaan Sandang | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota | Orang | 0 | 50,000,000 | | 0 | 0 | 70,000,000 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 1.06.06.2.01.04. | | Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan | Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota | Orang | 0 | 50,000,000 | | 0 | 0 | 60,000,000 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 1.06.06.2.01.05. | | Pelayanan Dukungan Psikososial | Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota | Orang | 0 | 50,000,000 | | 0 | 0 | 10,000,000 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| **1.06.06.2.02.** | | **Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota** | **Jumlah Kampung Siaga Bencana** | **Desa** | **1** | **50,000,000** | **2** | **196,766,405** | **1** | **100,000,000** | **1** | **97,229,040** | **1** | **8,870,873** | **1** | **1,666,666** | **1** | **12,023,889** | **1** | **38,115,326** | **1** | **60,676,754** | **100.00** | **62.41** | **1** | **196,766,405** | **100.00** | **393.53** | |
| 1.06.06.2.02.01. | | Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana | Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota | Kampung | 1 | 50,000,000 | 1 | 196,766,405 | 1 | 100,000,000 | 1 | 97,229,040 | 0 | 8,870,873 | 0 | 1,666,666 | 0 | 12,023,889 | 1 | 38,115,326 | 1 | 60,676,754 | 100.00 | 62.41 | 2 | 196,766,405 | 200.00 | 393.53 | dilaksanakan di TW IV |
| **1.06.07.** | | **PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN** | **Persentase Taman Makan Pahlawan yang dikelola** | **Persen** | **100** | **20,000,000** | **200** | **60,144,069** | **100** | **50,000,000** | **100** | **44,761,000** | **100** | **1,430,834** | **100** | **729,834** | **100** | **31,992,668** | **100** | **737,925** | **100** | **34,891,261** | **100.00** | **77.95** | **100** | **60,144,069** | **100.00** | **300.72** | |
| **1.06.07.2.01.** | | **Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota** | **Persentase Taman Makam Pahlawan yang dipelihara** | **Persen** | **100** | **20,000,000** | **200** | **60,144,069** | **100** | **50,000,000** | **100** | **44,761,000** | **100** | **1,430,834** | **100** | **729,834** | **100** | **31,992,668** | **100** | **737,925** | **100** | **34,891,261** | **100.00** | **77.95** | **100** | **60,144,069** | **100.00** | **300.72** | |
| 1.06.07.2.01.02. | | Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten / Kota | Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota | Makam | 11 | 20,000,000 | 22 | 60,144,069 | 11 | 50,000,000 | 11 | 44,761,000 | 11 | 1,430,834 | 11 | 729,834 | 11 | 31,992,668 | 11 | 737,925 | 11 | 34,891,261 | 100.00 | 77.95 | 33 | 60,144,069 | 300.00 | 300.72 | |

## 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, telah mengubah pola perencanaan yang ada, dimana SKPD menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan produk perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan pendekatan politik, pendekatan teknokratik, pendekatan partisipatif serta pendekatan bottom-up dan top down, yang dikenal dengan istilah shopping list key working plant. Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat yang selama ini seolah-olah hanya sebagai pelengkap dalam proses perencanaan. Kecilnya realisasi dari usulan yang disampaikan masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dapat tertampung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selama ini, memberikan indikasi terhadap kebenaran pernyataan diatas. Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis perencanaan perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi masyarakat dan mengusulkannya dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang memang benar-benar dibutuhkan untuk membawa kearah yang lebih baik lagi, bukan kegiatan kegiatan yang diinginkan seperti kebanyakan usulan selama ini. Kondisi tersebut diatas sangat erat kaitannya dengan keberadaan institusi perencana dalam hal ini Dinas Sosial yang merupakan unsur pembantu Kepala Daerah yang mempunyai fungsi sebagai penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Sosial.

Dalam menyelenggarakan fungsi tersebut di atas, Dinas Sosial mempunyai tujuan dan sasaran yang akan di capai, sebagai berikut :

Tujuan yang akan dicapai adalah:

1. Meningkatkan Kesejahteraan Sosial
2. Meningkatkan Birokrasi yang bersih dan akuntabel
3. Terwujudnya Pelayanan Publik yang Prima

Sasaran yang akan dicapai adalah:

1. Meningkatnya Perlindungan, Rehabilitasi dan Jaminan Sosial
2. Meningkatnya Kinerja Pemerintah Daerah
3. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat

Untuk lebih jelasnya, pencapaian indikator-indikator sasaran tersebut diuraikan dalam tabel capaian kinerja pelayanan Dinas Sosial Tahun 2024.

Secara rinci capaian kinerja pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Natuna disajikan pada Tabel 2.2

**Tabel 2.2**
**Capaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial**

| NO | Tujuan | Indikator | Sasaran | Indikator | Kondisi Awal | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target | Realisasi | Capaian | Target | Realisasi | Capaian | Target | Realisasi | Capaian |
| 1 | Meningkatkan Kesejahteraan Sosial | Persentase Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) | Penguatan Pelaksanaan Perlindungan, Rehabilitasi dan Jaminan Sosial | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) | 50,41 | 50.95 | 77.21 | 152 | 51.04 | 75.44 | 148 | 51.13 | 77.70 | 152 |
| 2 | Meningkatkan Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel | Nilai SAKIP | Meningkatnya Kinerja Pemerintah Daerah | Nilai Evaluasi SAKIP | 78.28 | 78.80 | 73.15 | 92.83 | 79 | 78.05 | 98.80 | 79.50 | 75.05 | 94.40 |
| 3 | Terwujudnya Pelayanan Publik yang Prima | Indeks Pelayanan Publik | Meningkatnya Kepuasan Masyarakat | Indeks Kepuasan Masyarakat | 3,46 | 3.46 | 3.48 | 101 | 3.47 | 3.47 | 100 | 3.48 | 3.63 | 104 |

## 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.3.1. Analisis Tingkat Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah dan Hal-hal Kritis terkait Pelayanan Daerah

Dinas Sosial telah melaksanakan tugas pokok dan fungsi utamanya dalam upaya menunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang sosial dengan sangat baik. Hal tersebut tercermin dalam capaian indikator yang menjadi tanggungjawab Dinas Sosial. Pencapaian indikator Dinas Sosial Kabupaten Natuna Tahun 2024 sangat tinggi, ditunjukkan oleh tabel berikut :

**Tabel 2.3**
**Capaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Tahun 2024**

| No | Sasaran | Indikator | Satuan | Target | Realisasi | Capaian |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Penguatan Pelaksanaan Perlindungan, Rehabilitasi dan Jaminan Sosial | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) | Persen | 51.13 | 77.70 | 152 |
| 2 | Meningkatnya Kinerja Pemerintah Daerah | Nilai Evaluasi SAKIP | Nilai | 79.50 | 75.05 | 94.40 |
| 3 | Meningkatnya Kepuasan Masyarakat | Indeks Kepuasan Masyarakat | Nilai | 3.48 | 3.63 | 104 |

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Dinas Sosial Kabupaten Natuna Tahun 2024 disimpulkan bahwa seluruh indikator sasaran berkriteria sangat memuaskan, dengan rata-rata capaian sebesar 116%.

Berdasarkan analisis gambaran pelayanan perangkat daerah, kajian hasil evaluasi pelaksanaan perangkat daerah, serta kajian terhadap pencapaian kinerja renstra perangkat daerah, maka dapat dirumuskan isu-isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Natuna. Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan

penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan renja perangkat daerah tahun sebelumnya, serta capaian kinerja renstra perangkat daerah.

Sebelum dirumuskan isu penting dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi, akan dijelaskan dahulu beberapa hal yang perlu dipertimbangkan yaitu sebagai berikut:

a. Beberapa permasalahan dalam peningkatan pelayanan Dinas Sosial adalah sebagai berikut :
   - Masih tingginya masalah sosial masyarakat yang belum tertangani
   - Tingkat kemiskinan yang masih tinggi dan menjadi permasalahan sosial didaerah dan nasional
   - Banyaknya jumlah pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, tetapi cakupannya penanganannya masih rendah
   - Terbatasnya sarana komunikasi dan angkutan dalam upaya penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang disebabkan oleh kondisi geografis Kabupaten Natuna yang berbentuk kepulauan
   - Belum optimalnya pemberdayaan PSKS.

b. Tantangan dalam meningkatkan pelayanan Dinas Sosial adalah sebagai berikut :
   - Adanya perubahan kebijakan dari tingkat pusat yang belum tentu sesuai dengan kondisi daerah
   - Kurangnya sinkronisasi regulasi yang ada baik antara Kementerian Sosial, OPD terkait dan regulasi daerah
   - Kurangnya SDM dan personil yang menangani permasalahan sosial secara khusus

c. Peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas Sosial adalah sebagai berikut:
   - Adanya dukungan Program dan Anggaran baik dari pemerintah Pusat, Provinsi dan Pemerintah Daerah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat untuk mendorong program percepatan pengentasan kemiskinan di daerah khususnya dalam memenuhi kebutuhan dasarnya dan inklusivitas bagi penduduk miskin dan rentan, penyandang disabilitas, dan kelompok marjinal lainnya.
   - Kuatnya komitmen pemerintah daerah dalam hal perlindungan dan jaminan sosial

- Adanya sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan dasar

Beberapa isu penting dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Natuna sebagai berikut :

- Masih tingginya masalah kesejahteraan sosial
- Belum optimalnya pemberdayaan PSKS
- Masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung PPKS

## 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berdasarkan dokumen RKPD Kabupaten Natuna tahun 2024, secara umum telah sesuai dengan hasil analisis kebutuhan. Hal ini terlihat dari rumusan program, kegiatan dan subkegiatan dalam rancangan awal RKPD sudah selaras dan anggarannya telah sesuai dengan kebutuhan.

## 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Pada tahun 2026 tidak terdapat usulan program dan kegiatan dari pemangku kepentingan khususnya di bidang Sosial.

**Tabel 2.4**
**Usulan Program dan Kegiatan Pembangunan Tahun 2026 dari Pemangku Kepentingan**

| No | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Besaran/Volume | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada |

# BAB III
# TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

## 3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Indonesia memiliki cita-cita besar menjadikan Indonesia Emas 2045 sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan. Indonesia akan menjadi negara dengan pendapaten per kapita setara negara-negara maju yang disertai kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang, Negara yang berdaulat dan berperan penting di dunia Internasional, Negara yang memiliki Sumber Daya Manusia yang unggul, serta negara yang berkomitmen menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan. Sasaran Utama Visi Indonesia Emas 2045 adalah:

1. Pendapatan per kapita setara denga Negara maju
2. Kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang
3. Kepemimpinan dan penganruh di dubiainternasional meningkat
4. Daya saing sumber daya manusia meningkat
5. Penurunan intensitas emisi GRK menuju net zero emission.

Dalam RPJPN Tahun 2025-2045 telah dirumuskan strategi besar untuk Mencapai Visi Indonesia Emas 2045 melalui 8 misi agenda pembangunan, diantaranya:

1. Transformasi Sosial
2. Transformasi Ekonomi
3. Transformasi Tata Kelola
4. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi
5. Supermasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia
6. Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan
7. Mewujudkan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan
8. Mewujudkan Kesinambungan Pembangunan

Visi Presiden periode 2025-2029 yaitu “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”. Visi tersebut mengandung arti pembangunan memerlukan kerja sama seuluruh putra-putri terbaik

bangsa dengan kesamaan tekad berdasarkan fondasi yang telah dibangun oleh pemerintah sebelumnya untuk mewujudkan Indonesia setara Negara maju di tahun 2045. Visi ini dicapai melalui Delapan Misi Presiden yang dituangkan dalam Delapan Asta Cita.

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur

## 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

### 3.2.1 Tujuan

Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis yang dihadapi. Dengan demikian tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang diharapkan dapat menggambarkan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun.

Tujuan akan menggambarkan kondisi yang ingin dicapai di masa depan dengan lebih mengoperasionalkan pelaksanaan misi. Tujuan juga mencerminkan adanya prioritas program dan kegiatan dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Melalui perumusan tujuan diharapkan dapat menunjuk suatu kondisi yang ingin dicapai ke depan atau mengarahkan perumusan sasaran tahunan, arah kebijaksanaan, pogram serta kegiatan. Tujuan Dinas Sosial Kabupaten Natuna konsisten dengan tugas pokok dan fungsinya secara kolektif menggambarkan arah strategisnya dan perbaikan-perbaikan yang ingin dicapai. Tujuan Dinas Sosial adalah Meningkatkan Kesejahteraan Sosial dengan indikator tujuan sebagai berikut:

**Tabel 3.1**
**Tujuan Dinas Sosial Tahun 2026**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **1. Misi Ke 1 Meningkatkan Perekonomian Berbasis Kemaritiman dan Keunggulan Daerah yang Berwawasan Lingkungan**<br>**2. Misi ke 4 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Berbasis Teknologi** | | | |
| **Tujuan** | **Indikator Tujuan** | **Rumus Perhitungan** | **Target** |
| Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Melalui Pelayanan Publik yang Akuntabel | Indeks Pengeluaran Riil | Dihitung BPS | 15.988 |
| | Indeks Pelayanan Publik | Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pemerintah Daerah | 4,48 |
| | Nilai Sakip | Nilai Evaluasi dari Inspektorat | 78,75 |

### 3.2.1 Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, bisa dicapai, rasional untuk jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Dengan demikian Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan. Sasaran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam proses perencanaan strategis. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi.

Sasaran Dinas Sosial merupakan gambaran yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu maksimal 1 (satu) tahun atau kurang dari 1 tahun guna mencapai tujuan yang telah dirumuskan untuk 5 tahun ke depan. Indikator kinerja diperlukan dalam pengukuran atau penilaian keberhasilan maupun kegagalan pencapaian sasaran.

Penetapan indikator kinerja merupakan proses identifikasi dan klasifikasi indikator kinerja melalui sistim pengumpulan dan pengolahan data/informasi untuk menentukan kinerja kegiatan, program dan kebijakan. Penetapanan indikator kinerja harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

Penetapan Sasaran Dinas Sosial Kabupaten Natuna untuk periode Renstra 2025-2029, beserta indikator capaiannya diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan kegiatan, sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat diukur, dan dapat dicapai. Sasaran yang akan dicapai pada tahun 2026 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.2**
**Sasaran Dinas Sosial Tahun 2026**

| Sasaran | Indikator | Rumus Perhitungan | Target |
|---|---|---|---|
| Meningkatnya Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) | Persentase Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) | Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani/ Jumlah seluruh Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dalam satu tahun x 100 | 72,21 |
| Meningkatnya Kinerja dan Layanan Publik Perangkat Daerah | Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah | Hasil Pemanatauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Perangkat Daerah | 4,59 |
| | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | LHE Sakip dari Inspektorat Daerah | 78,75 |

## 3.3 Program dan Kegiatan

### 3.3.1 Faktor-faktor yang menjadi Bahan Pertimbangan Terhadap Rumusan Program dan Kegiatan

Faktor-faktor yang menjadi bahan petimbangan terhadap rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Natuna pada tahun 2026 yaitu sebagai berikut:

1. Mengarah pada Dinas Sosial yang mengarah pada pencapaian visi dan misi Bupati sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Natuna tahun 2025-2029
2. Mengarahkan pada penanganan permasalahan dan isu strategis dalam pelaksanaan pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Natuna sebagaimana tertuang dalam Renstra tahun 2025-2029

### 3.3.2 Uraian Garis Besar Rekapitulasi Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Program kemudian dijabarkan dalam beberapa kegiatan dan subkegiatan sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang lebih terukur. Anggaran untuk melaksanakan 4 (empat) program, 14 (empat belas) kegiatan dan 30 (tiga puluh) sub kegiatan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2026 secara keseluruhan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2026

**Tabel 3.3**
**Rekapitulasi Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan**
**Tahun 2026**

| No | Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Jumlah (RP) | Sumber Pendanaan |
|---|---|---|---|
| | **Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelauanan Dasar** | **7.370.303.437** | |
| | **Urusan Pemerintahan Bidang Sosial** | **7.370.303.437** | |
| **1** | **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota** | **3.933.773.337** | |
| | **Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **10.000.000** | |
| | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 10.000.000 | APBD |
| | **Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **3.196.246.026** | |
| | Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 3.196.246.026 | APBD |

| No | Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Jumlah (RP) | Sumber Pendanaan |
|---|---|---|---|
| | **Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **85.155.100** | |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 9.999.600 | APBD |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 9.532.000 | APBD |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material | 1.000.000 | APBD |
| | Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 64.221.000 | APBD |
| | Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 402.500 | APBD |
| | **Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **195.322.211** | |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 10.600.000 | APBD |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 5.129.211 | APBD |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 179.593.000 | APBD |
| | **Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **447.050.000** | |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 43.053.500 | APBD |
| | Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 4.000.000 | APBD |
| | Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 399.996.500 | APBD |
| **2** | **Program Rehabilitasi Sosial** | **146.289.600** | |
| | **Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial** | **146.289.600** | |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu | 49.979.100 | APBD |
| | Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga | 49.975.000 | APBD |
| | Sub Kegiatan Pemberian Layanan Rujukan | 46.335.500 | APBD |
| **3** | **Program Perlindungan dan Jaminan Sosial** | **3.170.241.300** | |
| | **Kegiatan Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar** | **121.331.000** | |
| | Sub Kegiatan Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar | 121.331.000 | APBD |
| | **Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota** | **3.048.910.300** | |
| | Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat | 275.990.300 | APBD |
| | Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga | 2.772.920.000 | APBD |
| **4** | **Progran Penanganan Bencana** | **100.001.000** | |
| | **Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota** | **100.001.000** | |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Makanan | 100.001.000 | APBD |
| **5** | **Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan** | **19.998.200** | |
| | **Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam** | **19.998.200** | |

| No | Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Jumlah (RP) | Sumber Pendanaan |
|---|---|---|---|
| | **Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota** | | |
| | Sub Kegiatan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | 19.998.200 | APBD |
| | **TOTAL** | **7.370.303.437** | |

### 3.4 Cascading dan Crosscutting

Salah satu sub komponen dalam perencanaan adalah mengukur sejauhmana perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting).

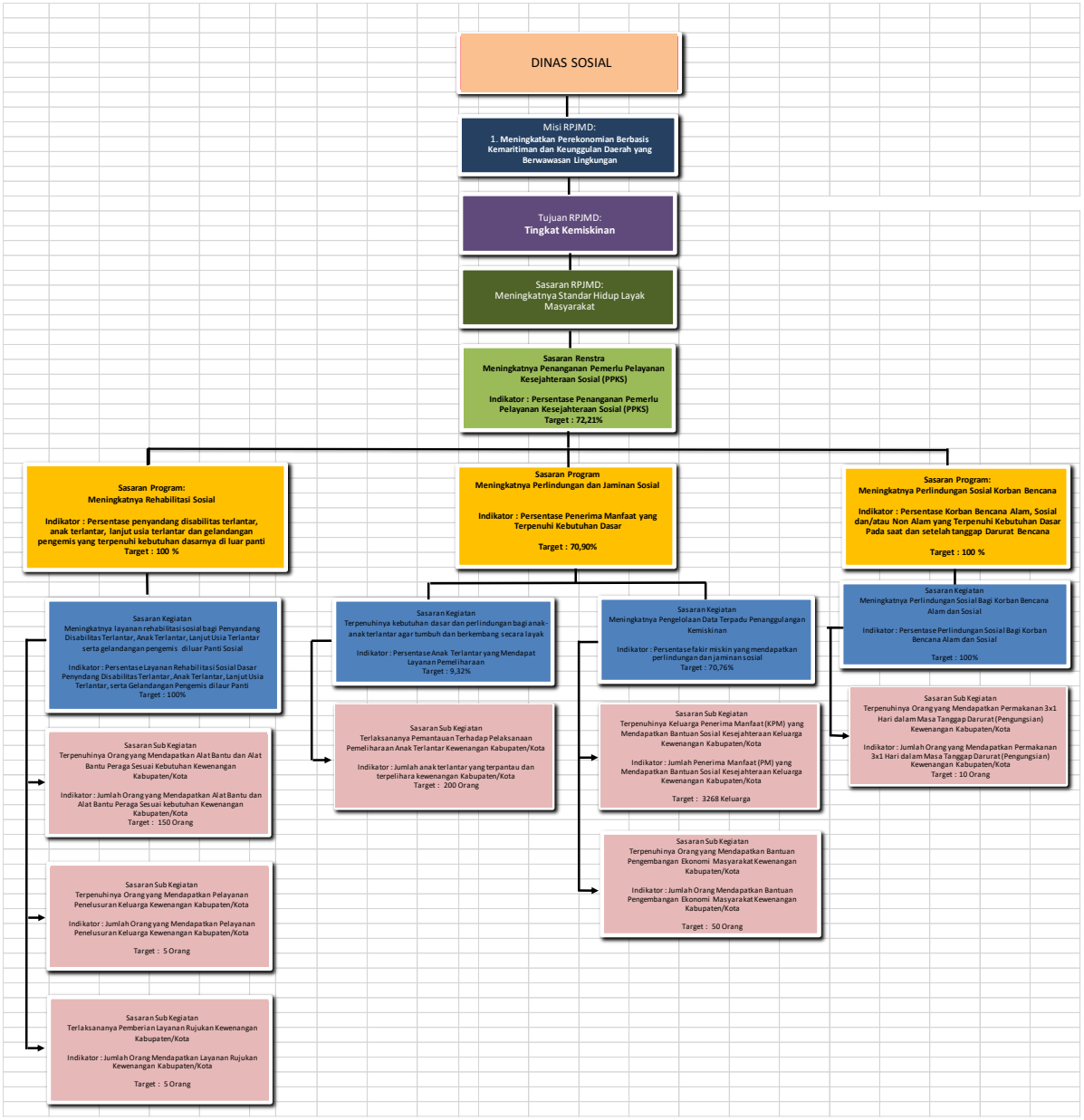
#### 3.4.1 Cascading

Cascading Dinas Sosial Kabupaten Natuna adalah proses penjabaran dan penyelarasan Sasaran Strategis (SS), Indikator Kinerja Utama (IKU), dan/atau target IKU secara vertikal dari level unit/pegawai yang lebih tinggi ke level unit/pegawai yang lebih rendah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 3.1 Cascading Dinas Sosial Tahun 2026.

#### 3.4.2 Crosscutting

Crosscutting Dinas Sosial Tahun 2026 menggambarkan pencapaian target kinerja dipengaruhi oleh factor-faktor yang beririsan secara horizontal tidak selalu secara vertical (secara hirarki structural) sehingga dapat mengidentifikasi isu kinerja secara lebih menyeluruh. Bagan Cross Cutting dapat dilihat pada Gambar 3.2 Crosscutting Kinerja Program Dinas Sosial Tahun 2026.

# Gambar 3.1
# Cascading Dinas Sosial Tahun 2026



**Gambar 3.2**
**Crosscutting Kinerja Program Dinas Sosial Tahun 2026**



# BAB IV
# RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

## 4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Sosial Kabupaten Natuna pada tahun 2026

Faktor-faktor yang menjadi bahan petimbangan terhadap rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Natuna pada Tahun 2026 yaitu sebagai berikut:

**1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

- Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

  Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 10.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

  a. Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 10.000.000,00
- Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

  Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 3.196.246.026,00 dengan rincian sebagai berikut :

  a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 3.196.246.026,00
- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

  Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 85.155.100,00 dengan rincian sebagai berikut :

  a. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 9.999.600,00
  b. Sub Kegiatan Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 9.532.000,00
  c. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material, Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 1.000.000,00

d. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 64.221.000,00
e. Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD, Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 402.500,00

- Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

  Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 195.322.211,00 dengan rincian sebagai berikut :

  a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 10.600.000,00
  b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 5.129.211,00
  c. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 179.593.000,00

- Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

  Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 447.050.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

  a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 43.053.500,00
  b. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 4.000.000,00
  c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 399.996.500,00

**2. Program Rehabilitasi Sosial**

- Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial

  Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 146.289.600,00 dengan rincian sebagai berikut :

  a. Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu, Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 49.979.100,00
  b. Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga, Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 49.975.000,00
  c. Sub Kegiatan Pemberian Layanan Rujukan, Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 46.335.500,00

**3. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial**

- Kegiatan Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar

  Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 121.331.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

  a. Sub Kegiatan Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar, Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 121.331.000,00

- Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

  Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 3.048.910.300,00 dengan rincian sebagai berikut :

  a. Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat, Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 275.990.300,00
  b. Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga, Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 2.772.920.000,00

**4. Program Penanganan Bencana**

- Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 100.001.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Sub Kegiatan Penyediaan Makanan, Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 100.001.000,00

5. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

- Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota

  Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 19.998.200,00 dengan rincian sebagai berikut :

  a. Sub Kegiatan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota, Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 19.998.200,00.

Secara rinci program, kegiatan dan sub kegiatan serta Pagu Indikatif yang akan dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Natuna tahun 2026 serta prakiraan maju tahun 2027 tertuang dalam Tabel 4.1 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Dinas Sosial Kabupaten Natuna Tahun 2026).

# Tabel 4.1
# Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Dinas Sosial Kabupaten Natuna Tahun 2026

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 | 10 | 11 | 15 | 16 |
| | | **DINAS SOSIAL** | | | **7,370,303,437.00** | | | | **8,762,629,300.00** |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | **3,763,061,311.00** | | | | **4,814,742,300.00** |
| | **1.06** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL** | | | **3,763,061,311.00** | | | | **4,814,742,300.00** |
| 1. | **1.06.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **-** | **-** | **326,531,211.00** | | | **-** | **1,302,965,000.00** |
| | 1.06.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | - | 10,000,000.00 | | | - | 21,000,000.00 |
| | 1.06.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | 2 Laporan | 10,000,000.00 | Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | | 21,000,000.00 |
| | 1.06.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | - | 0.00 | | | - | 75,000,000.00 |
| | 1.06.01.2.05.0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan* | 5 Orang | 0.00 | Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | | 75,000,000.00 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.06.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | 74,155,500.00 | | | - | 348,265,000.00 |
| | 1.06.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | 3 Paket | 9,532,000.00 | Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | | 30,000,000.00 |
| | 1.06.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | 1 Dokumen | 0.00 | Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | | 6,000,000.00 |
| | 1.06.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | 28 Laporan | 64,221,000.00 | Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | | 307,265,000.00 |
| | 1.06.01.2.06.0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD* | 6 Dokumen | 402,500.00 | Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | | 5,000,000.00 |
| | 1.06.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | - | 0.00 | | | - | 549,500,000.00 |
| | 1.06.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan* | 2 Unit | 0.00 | Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | | 70,000,000.00 |
| | 1.06.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* | 5 Unit | 0.00 | Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | | 130,000,000.00 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.06.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan* | 15 Unit | 0.00 | Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | | 299,500,000.00 |
| | 1.06.01.2.07.0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan* | 1 Unit | 0.00 | Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | | 50,000,000.00 |
| | 1.06.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | 195,322,211.00 | | | - | 229,000,000.00 |
| | 1.06.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | 1 Laporan | 10,600,000.00 | Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | | 6,000,000.00 |
| | 1.06.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | 1 Laporan | 5,129,211.00 | Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | | 2,000,000.00 |
| | 1.06.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | 12 Laporan | 179,593,000.00 | Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | | 221,000,000.00 |
| | 1.06.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | 47,053,500.00 | | | - | 80,200,000.00 |
| | 1.06.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | 3 Unit | 43,053,500.00 | Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | | 24,200,000.00 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.06.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | 5 Unit | 4,000,000.00 | Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | | 6,000,000.00 |
| | 1.06.01.2.09.0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | 1 Unit | 0.00 | Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | | 50,000,000.00 |
| 2. | **1.06.02** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL** | ***Persentase Pemberdayaan Sosial*** | **50 Persen** | **0.00** | | | **-** | **304,870,000.00** |
| | 1.06.02.2.03 | Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota | *Jumlah PSKS yang dikembangkan* | 6 PSKS | 0.00 | | | - | 304,870,000.00 |
| | 1.06.02.2.03.0012 | Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang mendapatkan Peningkatan Kapasitas dan fasilitasi dalam penanganan kasus Kewenangan Kabupaten/Kota* | 1 Orang | 0.00 | Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | | 304,870,000.00 |
| 3. | **1.06.04** | **PROGRAM REHABILITASI SOSIAL** | **-** | **-** | **146,289,600.00** | | | **-** | **1,503,564,300.00** |
| | 1.06.04.2.01 | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | - | - | 146,289,600.00 | | | - | 1,503,564,300.00 |
| | 1.06.04.2.01.0001 | Penyediaan Permakanan | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota* | 25 Orang | 0.00 | Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | | 50,000,000.00 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.06.04.2.01.0002 | Penyediaan Sandang | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota* | 10 Orang | 0.00 | Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | | 30,000,000.00 |
| | 1.06.04.2.01.0003 | Penyediaan Alat Bantu | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota* | 150 Orang | 49,979,100.00 | Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | | 611,830,000.00 |
| | 1.06.04.2.01.0005 | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota* | 50 Orang | 0.00 | Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | | 194,000,000.00 |
| | 1.06.04.2.01.0006 | Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gel andangan Pengemis dan Masyarakat | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota* | 90 Orang | 0.00 | Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | | 180,000,000.00 |
| | 1.06.04.2.01.0011 | Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota* | 5 Orang | 49,975,000.00 | Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | | 159,534,300.00 |
| | 1.06.04.2.01.0012 | Pemberian Layanan Rujukan | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota* | 5 Orang | 46,335,500.00 | Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | | 278,200,000.00 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. | **1.06.05** | **PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL** | **-** | **-** | **3,170,241,300.00** | | | **-** | **870,343,000.00** |
| | 1.06.05.2.01 | Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar | - | - | 121,331,000.00 | | | - | 100,000,000.00 |
| | 1.06.05.2.01.0003 | Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota* | 200 Orang | 121,331,000.00 | Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | | 100,000,000.00 |
| | 1.06.05.2.02 | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | - | - | 3,048,910,300.00 | | | - | 770,343,000.00 |
| | 1.06.05.2.02.0004 | Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota* | 50 Orang | 275,990,300.00 | Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | | 318,500,000.00 |
| | 1.06.05.2.02.0006 | Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota* | 3268 Orang | 2,772,920,000.00 | Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | | 304,548,000.00 |
| | 1.06.05.2.02.0008 | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan* | 3268 Usulan | 0.00 | Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | | 147,295,000.00 |
| 5. | **1.06.06** | **PROGRAM PENANGANAN BENCANA** | **-** | **-** | **100,001,000.00** | | | **-** | **383,000,000.00** |
| | 1.06.06.2.01 | Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota | - | - | 100,001,000.00 | | | - | 283,000,000.00 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.06.06.2.01.0001 | Penyediaan Makanan | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota* | 10 Orang | 100,001,000.00 | Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | | 283,000,000.00 |
| | 1.06.06.2.02 | Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota | - | - | 0.00 | | | - | 100,000,000.00 |
| | 1.06.06.2.02.0002 | Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota* | 17 Orang | 0.00 | Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | | 100,000,000.00 |
| 6. | **1.06.07** | **PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN** | **-** | **-** | **19,998,200.00** | | | **-** | **450,000,000.00** |
| | 1.06.07.2.01 | Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | - | - | 19,998,200.00 | | | - | 450,000,000.00 |
| | 1.06.07.2.01.0001 | Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota* | 1 Dokumen | 19,998,200.00 | Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | | 450,000,000.00 |
| 1. | **X.XX.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **-** | **-** | **3,607,242,126.00** | | | **-** | **3,947,887,000.00** |
| | X.XX.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | | 3,196,246,026.00 | | | - | 3,498,887,000.00 |
| | X.XX.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | 22 Orang/bulan | 3,196,246,026.00 | Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | | 3,498,887,000.00 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | X.XX.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | 10,999,600.00 | | | - | 49,000,000.00 |
| | X.XX.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | 1 Paket | 9,999,600.00 | Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | | 48,000,000.00 |
| | X.XX.01.2.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan* | 1 Paket | 1,000,000.00 | Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | | 1,000,000.00 |
| | X.XX.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | 399,996,500.00 | | | - | 400,000,000.00 |
| | X.XX.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | 1 Unit | 399,996,500.00 | Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | | 400,000,000.00 |
| | **J U M L A H** | | | | **7,370,303,437.00** | | | | **8,762,629,300.00** |

# BAB V
# PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Natuna Tahun 2026 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis tahun 2025-2029. Program, kegiatan dan subkegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2026 pada akhirnya diharapkan dapat mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan urusan sosial yang bermanfaat guna mendukung pencapaian visi Kabupaten Natuna tahun 2025-2029.

Untuk mencapai hal tersebut langkah-langkah yang diambil sebagai kaidah pelaksanaan kegiatan yaitu :

1. Seluruh pajabat struktural di Dinas Sosial agar mengawal pelaksanaan Renja tahun 2026 sebaik-baiknya sehingga dapat teranggarkan dan terlaksana sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan program kerja tahun 2026 harus melalui proses yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kaidah-kaidah yang berlaku;
3. Guna memastikan pelaksanaan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Renja berjalan dengan baik, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Program, Kegiatan Sub Kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja tahun 2026.

Rencana tindak lanjut dalam merespon dimasa yang akan datang melalui prioritas kegiatannya adalah :

1. Seluruh unsur di Dinas Sosial melaksanakan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Renja tahun 2026 sebaik-baiknya sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
2. Kepala Dinas dibantu Sekretariat melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2026 guna memastikan pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan berjalan dengan baik.

Adanya Renja Dinas Sosial Tahun 2026, maka penetapan prioritas pembangunan pada urusan sosial diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan

perangkat daerah yang lain. Semoga dengan tersusunnya Renja Dinas Sosial Kabupaten Natuna Tahun 2026, mendorong peningkatan kualitas kinerja dapat perannya sebagai perangkat daerah yang menangani urusan sosial. Selain itu, diharapkan Rencana Kerja tahun 2026 ini mampu mendorong pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Sosial Kabupaten Natuna yang telah ditetapkan dan Rencana Strategis (Renstra) tahun 2025-2029.

Ranai, 24 September 2025
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Natuna




**PURYANTI, SP., M.A.P**
NIP. 19750706 200003 2 008